

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Kebijakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

Tahap implementasi merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Tahap ini adalah tahapan untuk mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan yang ada pada tahap implementasi, akan menentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mencapai keberhasilan atau sebaliknya. Sehingga suatu kebijakan yang baik apabila manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan, yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberika perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Berlakunya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana sebagai acuan bagi TAGANA Kota Semarang dalam mewujudkan penanggulangan bencana bidang sosial berbasil masyarakat. Untuk melihat pencapaian keberhasilan pelaksanaannya, dapat dilihat dari tiga fenomena, diantaranya yaitu Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Pasca Bencana.

1. Pra bencana

Pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada juga minimal ketika terjadi bencana. Pelaksanaan ini meliputi pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pelaksanaan ini

a. Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Pemetaan daerah rawan bencana telah berjalan dengan baik, karena pemerintah telah memberikan pelayanan dengan melakukan pendataan secara langsung ke tempat-tempat lingkungan masyarakat dan menjalin kordinasi dengan pihak-pihak terkait.

b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat telah berjalan dengan baik, karena pemerintah telah mengajak masyarakat diajak untuk melakukan kajian bencana, membuat perencanaan pengelolaan bencana, dan melaksanakannya. Kemudian masyarakat itu sendiri telah memberikan pelayanan dengan melakukan mencegah dan mengurangi dampak dan risiko bencana yang terjadi di lingkungan terdekatnya adalah dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat dan melakukan kerja bakti rutin di lingkungan masyarakat.

c. Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan Risiko Bencana belum berjalan dengan baik. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya terkait pengurangan risiko bencana yakni dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, kemudian penanaman mangrove, meningkatkan swadaya masyarakat, dan pembuatan tanggul-tanggul, namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, sampah-sampah masih banyak yang menumpuk tidak pada tempatnya. Hal tersebut akan memicu bencana alam seperti banjir, rob, dan tanah longsor. Walaupun beberapa kali sering terjadi, namun masyarakat yang tidak juga mengubah kebiasannya, tidak dapat menghindari dari bencana ini. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan pengurangan risiko bencana.

d. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik. Dibuktikan telah dilakukannya pelatihan upaya cara evakuasi, melakukan koordinasi untuk

menjalin kerja sama terkait dengan bencana, mengadakan pelatihan bersama dan saling tukar ilmu mengenai kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan berupa pelatihan bersama dan saling tukar ilmu mengenai kesiapsiagaan bencana agar masyarakat semakin cerdas dalam menanggulangi bencana, siaga terhadap bencana, dan memberikan kesadaran agar lebih mencintai lingkungan.

e. Peringatan Dini

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait peringatan dini, dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Meskipun pemerintah telah memiliki sebuah sistem bernama *Early Warning System* sebagai upaya dalam pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya bencana. Namun pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA), sehingga BPBD sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di Kota Semarang tidak begitu cepat dalam mendapatkan informasi apabila deteksi tersebut memberi sinyal peringatan. Kemudian baru adanya satu sistem deteksi dini yaitu untuk antisipasi rob.

2. Tanggap Darurat

Pada penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi

sistem kaji cepat, pendataan korban bencana, evakuasi ke penampungan sementara, dapur umum, dan pemberian logistik.

a. Sistem Kaji Cepat

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait sistem kaji cepat, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, karena untuk proses mengkaji dengan cepat yaitu mendatangi tempat lokasi bencana. Kemudian mendata lalu ke dinas sosial atau instansi sosial untuk melaporkan kejadian bencana dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait supaya nanti bisa ditangani dengan cepat dan tepat.

b. Pendataan Korban Bencana

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait Pendataan Korban Bencana, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, bahwa pendataan korban bencana dilakukan dengan proaktif terjun ke lapangan sehingga data korban lebih akurat.

c. Evakuasi ke Penampungan Sementara

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait evakuasi ke penampungan sementara, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, karena upaya evakuasi perlu adanya kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaannya. Evakuasi tersebut bisa dilakukan dengan upaya menyelamatkan korban bencana dari tempat tidak aman ke tempat yang aman. Dimana pihak-pihak terkait telah memastikan lokasi mana yang akan dijadikan tempat penampungan sementara untuk kegiatan evakuasi.

d. Dapur Umum

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait dapur umum, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik. Dapur umum diselenggarakan untuk menyediakan makanan dan kemudian didistribusikan kepada korban bencana dalam waktu cepat dan tepat. Sebagaimana yang ada pada hasil wawancara, dapur umum akan terselenggara apabila terdapat banyaknya korban bencana. Apabila korban bencananya tidak sampai demikian, maka hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar terutama dari masyarakat yang tidak terkena bencana.

e. Pemberian Logistik

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait pemberian logistik, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik. Terbukti oleh pemberian logistik digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terdiri dari barang habis pakai. Pelaksanaan ini melibatkan sistem kelembagaan antar instansi-instansi terkait. Selain itu juga dengan memaksimalkan kemampuan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian logistik telah berjalan dengan baik.

3. Pasca Bencana

Pada penanggulangan bencana pada pasca bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat setelah kejadian bencana yang meliputi pendataan kerugian material, pendataan kerusakan tempat tinggal, penanganan psikososial, dan pemulihan sosial.

a. Pendataan Kerugian Material

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait pendataan kerugian material, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, diketahui bahwa kerugian akibat

kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana membawa dampak yang tidak sedikit, seperti kerugian material. Menanggapi hal tersebut, pendataan terhadap kerugian material merupakan upaya tepat untuk menangani ini.

b. Pendataan Kerusakan Tempat Tinggal

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait pendataan kerusakan tempat tinggal, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, diketahui bahwa kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana membawa dampak yang tidak sedikit, seperti kerugian terhadap tempat tinggal korban. Menanggapi hal tersebut, pendataan terhadap kerugian tempat tinggal merupakan upaya tepat untuk menangani ini.

c. Penanganan Psikososial

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait penanganan psikososial, dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik, diketahui bahwa keadaan psikososial korban bencana dari suasana gembira bisa berubah menjadi depresi, cemas, sedih, putus asa, dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan dalam penanganan psikososial adalah melihat terlebih dahulu keadaan korban bencana. Kemudian setelah itu memberikan rujukan ke pihak-pihak yang tepat untuk menangani. Namun berdasarkan wawancara dengan ibu Sri, beliau mengkhawatirkan akan terjadinya kembali bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi.

d. Pemulihan Sosial

Berdasarkan hasil uraian wawancara terkait pemulihan sosial, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, diketahui bahwa sudah terdapat upaya pemulihan yang bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti

sebelum terjadinya bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis yang berlanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Kemudian kerjasama antar SKPD dalam memberikan pemulihan sosial korban bencana diperlukan untuk saling bersama-sama menangani hal ini.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menjadi Implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang, yaitu:

- a. Disahkannya regulasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana.
- b. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Dimana masyarakat tidak hanya sekedar menjadi objek dari bencana, namun juga sebagai pelaku dalam penanggulangan bencana.

2. Faktor Penghambat

Ketidakberhasilan dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan TAGANA dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, yaitu:

- a. Belum sempurnanya komunikasi koordinasi yang terjalin.
- b. Relawan-relawan TAGANA yang sudah berumur lanjut usia dan belum berjalannya regenerasi dengan baik.
- c. Keterbatasan anggaran membuat dalam melaksanakan kebijakan ini belum maksimal terutama dalam mengadakan kegiatan-kegiatan seputar kebencanaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dengan memperhatikan fenomena dalam Implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas agar pada proses pelaksanaannya dapat maksimal.
2. Pada sumber daya finansial agar meningkatkan anggaran dalam penanggulangan bencana.
3. Menambah jumlah sistem peringatan dini untuk antisipasi datangnya bencana.

4. Memperbaiki kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan agar kegiatan yang dilakukan dapat terkoordinir dengan baik antar SKPD yang terlibat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan penanggulangan bencana di Kota Semarang dan aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah.
6. Swasta berkomitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang yang dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah.